

GURU PROGRESIF (TELAH PEMIKIRAN PAULO FREIRE TENTANG PENDIDIKAN YANG MEMBEBAKANKAN)

Ahmad Saefudin, Subaidi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
ahmadsaefudin547@gmail.com
subaidi@unisnu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan tentang guru progresif yang di tawarkan oleh Paulo Freire terkait dengan pendidikan yang membebaskan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui guru progresif menurut Paulo Freire antara lain; (1) mengetahui bagaimana pandangan Paulo Freire tentang guru progresif, (2) mengetahui pemaknaan istilah progresif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian interpretatif. Hasil penelitian ini mencakup lima hal, antara lain: 1) progresivisme kurang sepakat dengan pendidikan yang bercorak otoriter, 2) konsentrasi perhatian progresivisme selalu bergerak maju (progres), 3) progresivisme menjunjung tinggi pengalaman sebagai ciri dinamika hidup, 4) progresivisme tidak saja mengakui ide-ide, teori-teori, atau cita-cita sebagai hal yang ada, tetapi yang ada itu harus dicari artinya bagi suatu kemajuan atau maksud-maksud baik lain, 5) progresivisme mengharuskan manusia dapat memfungsikan jiwanya untuk membina hidup di tengah persoalan yang menghimpit.

Kata kunci: guru progresif, pendidikan membebaskan, Paulo Freire.

Abstract

This research describes the progressive teachers offered by Paulo Freire related to liberating education. The focus of this research is to identify progressive teachers according to Paulo Freire, among others; (1) know how Paulo Freire views progressive teachers, (2) know the meaning of the term progressive. The method used in this research is interpretive research. The results of this study include five things, including: 1) progressivism disagrees with authoritarian-style education, 2) progressivism's attention concentration always moves forward (progress), 3) progressivism upholds experience as a characteristic of life dynamics, 4) progressivism does not only recognize ideas, theories, or ideals as things that exist, but what is there must be sought for meaning for a progress or other good intentions, 5) progressivism requires that humans can function their souls to foster life in the midst of pressing problems .

Keywords: progressive teacher; liberating education; Paulo Freire

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, siapapun bisa menjadi “guru yang membebaskan”, karena –meminjam istilahnya M. J. Langeveld- cara mendidik itu dapat dipelajari.¹ Permasalahan yang muncul biasanya bukan seputar jawaban apakah kita “mampu” menjadi “guru yang membebaskan”, melainkan apakah kita “mau”melakukannya di tengah

konstelasi ideologi-ideologi pendidikan yang berkembang?

William F. O’neil mengklasifikasikan ideologi pendidikan kontemporer ke dalam dua kelompok besar, yakni ideologi pendidikan konservatif dan ideologi pendidikan liberal. Bagi pendidik konservatif, tujuan puncak pendidikan ialah untuk membangkitkan dan meneguhkan kembali cara-cara lama yang lebih baik serta memapankan kembali tolok ukur

¹ M. J. Langeveld, *Padagogik Teoritis-Sistematis*, (tt.p: t.p.,t.t), hlm. 23.

tradisional dalam perilaku dan keyakinan. Salah satu cirinya mendudukan wewenang intelektual tertinggi berada di tangan komunitas orang-orang yang memiliki iman sejati. Kebenaran ditentukan melalui sebuah kesepakatan di antara orang-orang yang telah mencapai pencerahan moral. Kelompok ini kemudian diistilahkan sebagai penganut paham fundamentalisme pendidikan.² Masih sekubu dengan kaum fundamentalis, terdapat kaum konservatif lain. Mereka mengikuti paham intelektualisme pendidikan. Golongan ini berpendapat bahwa pendidikan harus dipasrahkan kepada elit intelektual yang berpendidikan tinggi. Wewenang dan kebijaksanaan guru lebih tinggi dibandingkan peserta didik. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sepenuhnya diarahkan pada garis-garis yang ditetapkan oleh guru. Penekanan ranah intelektual (ide) lebih penting daripada wilayah praktis (yang segera berguna bagi peserta didik).³ Ideologi konservatif terakhir, dinamakan O'neil sebagai paham konservatisme pendidikan yang mempercayai bahwa tujuan pendidikan adalah untuk melestarikan dan menyalurkan pola-pola perilaku sosial konvensional. Pengetahuan adalah sebuah cara untuk mengajukan nilai-nilai kemanusiaan sosial. Peserta didik memerlukan bimbingan yang ketat dari para guru.⁴

Ideologi liberal sebagai negasi dari ideologi konservatif memiliki pandangan-pandangan baru dalam

merumuskan konsepsi pendidikan.⁵ Tujuan utama pendidikan, menurut penganut paham liberalisme pendidikan ialah mempromosikan perilaku personal peserta didik yang efektif. Pengetahuan difungsikan sebagai alat pemecahan masalah melalui proses eksperimental. Wewenang pendidikan berada di tangan pendidik yang telah memperoleh latihan tingkat tinggi dan memiliki komitmen terhadap proses penyelidikan kritis sesuai dengan informasi baru yang relevan. Proses pembelajaran ditekankan pada aspek intelektual dan praktis.⁶

Sedangkan kaum liberasionis mengharuskan sasaran pendidikan berupa penanaman kembali masyarakat mengikuti alur kemanusiaan (humanistik). Kebebasan individu dan proses pembelajaran yang demokratis lebih diutamakan. Sekolah harus mengajarkan cara menyelesaikan persoalan-persoalan praktis melalui penerapan teknik pemecahan masalah, baik secara individu maupun kelompok.¹ Anarkisme pendidikan sebagai sempalan akhir dari kelompok liberal berkeyakinan untuk selalu membela pemusnahan seluruh kekangan kelembagaan terhadap kebebasan manusia.² Sekolah dianggap sebagai belenggu dan wajib dihapuskan untuk digantikan dengan pola belajar sukarela.³ Institusi pendidikan yang sering disebut dengan "sekolah" setiap harinya memaksa peserta didik untuk

² William F. O'neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, terj. Omi Intan Naomi, cet. ke-2, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 251.

³ *Ibid.*, hlm. 288-289.

⁴ *Ibid.*, hlm. 336-337.

⁵ Ideologi pendidikan liberal kemudian terbagi menjadi tiga arus utama pemikiran yaitu liberalisme, liberasionisme, dan anarkisme pendidikan. *Ibid.*, hlm. 347-374.

⁶ *Ibid.*, hlm. 455-457.

¹ *Ibid.*, hlm. 466.

² *Ibid.*, hlm. 482.

³ *Ibid.*, hlm. 482.

sekedar merekonstruksikan pengetahuan. Produk dari “sekolah” tidak lain ialah manusia-manusia yang “hafal” segudang teori, tapi tidak mampu mengimplementasikannya ke dalam problem realitas sosial. Peserta didik *paling banter* hanya sanggup “membeo” terhadap doktrin yang diajarkan dan tidak berani berkata “tidak” terhadap reproduksi ideologi dominan. Peserta didik terjerembab ke dalam jurang “alienasi” dan ketidaksadaran sehingga merasa terasing dari persoalan dunia yang sejatinya. Pantas saja jika Ivan Illich memperjuangkan konsep *descholarize*⁴ (pendidikan tanpa sekolah) sebagai alternatif untuk bisa maju menuju perubahan revolusioner dan mengeluarkan manusia dari nihilisme pendidikan.⁵

Salah satu contoh praktik penindasan terstruktur dalam pendidikan di Indonesia ialah pemberlakuan Ujian Nasional (UN) sebagai alat evaluasi pembelajaran. Ketidakadilan tercermin dari pengutamaan aspek kognitif (pengetahuan) sebagai tolok ukur penilaian dengan sertamerta mengabaikan domain afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) peserta didik. Ketakutan mental dialami seluruh elemen satuan pendidikan. Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab maju-mundurnya institusi tidak mau *kecolongan*. Begitupun segenap dewan guru. Lebih-lebih guru pengampu

materi pelajaran yang di-UN-kan. Tentu saja tekanan kejiwaan terbesar ada di pundak peserta didik. Akhirnya, segala cara pun ditempuh demi mencapai kesuksesan UN dengan indikator lulus 100%. Porsi pembelajaran (khususnya mapel UN) diperbanyak intensitas pertemuannya. Jika diperlukan, pihak sekolah mengadakan program karantina dengan *seabreg* aktivitas. Tidak jarang wali peserta didik pergi kepada *orang pintar*, entah itu kyai atau dukun, meminta dibacakan *wirid* atau mantera sebagai amalan doa agar putra-putrinya dipermudah mencapai kelulusan. Di akhir ritual, *orang pintar* dengan gaya *sok taunya* menitipkan *jimat* yang wajib dibawa peserta didik saat UN berlangsung. Ada juga *orang pintaryang* menghadiahi *oleh-oleh* kepada wali peserta didik berupa “air keramat” yang fungsinya untuk disiramkan di area gedung sekolah.

Kepala Sekolah tidak tinggal diam. Bersama dewan guru yang lain, *mengamini* manipulasi nilai rapor hasil Ujian Akhir Semester (UAS) supaya bisa mendongkrak hasil akhir nilai UN. Mereka tentu menyadari, segala bentuk pemalsuan adalah dosa. Termasuk rekayasa nilai rapor. Tetapi, apa mau dikata? Sistem yang menindas memaksa mereka gelap mata. Demi nilai simbolik kelulusan dalam UN. Itulah potret penindasan dalam sistem pendidikan Nasional. Jika mempergunjingkan “dosa”, seluruh warga Negara Indonesia ikut menanggung bebannya. Mulai rakyat jelata sampai elit yang bertahta. Dari kalangan yang tidak *melek* agama hingga kaum intelektual dan cerdas-cendekia. Semuanya mempunyai andil

⁴ Wacana komprehensif tentang konsep “Masyarakat Tanpa Sekolah” bisa dilihat dalam Ivan Illich, *Deschooling Society*, (London: Marion Boyars Publishers, 1974).

⁵ Miguel Escobar, dkk. (eds.), *Dialog Bareng Paulo Freire; Sekolah Kapitalisme yang Licik*, terj. Mundi Rahayu, cet. ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 1998), hlm. 64.

dalam menyumbangkan keterpurukan pendidikan.

Gambaran buram pendidikan Nasional berimbas pada anomali sendi-sendi ketatanegaraan lainnya. Pemimpin yang tidak punya kebijakan, politisi yang mempermainkan panggung politik dengan sandiwaranya, hakim yang kehilangan kebijaksanaannya, wakil rakyat (anggota dewan) yang tidak lagi merepresentasikan suara rakyat, aparat hukum yang *impoten* dalam menegakkan keadilan, pengusaha semakin mesraberselekuh dengan birokrat Negara demi kelancaran proyek yang sedang ditanganinya, koruptor merajalela, elit agama apatis dan sudah merasa cukup nyaman dalam singgasana peribadatannya, dan sederet kekacauan sistemik lainnya. Masih adakah harapan untuk mengokohkan pendidikan sebagai penyangga peradaban bangsa? Masih, inilah jawabannya. Selagi masih ada sosok guru progresif, dengan nada optimis jagat pendidikan akan kembali meraih puncak keemasannya.

B. Posisi guru dalam pandangan Paulo Freire

Guru dalam proses pembelajaran memegang posisi krusial sebagai pendamping peserta didik dalam menumbuhkan potensi alamiahnya. Secara yuridis-formal guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.⁶ Dalam pandangan Paulo Freire, pendidik harus secara konsisten menemukan dan terus mencari cara-cara yang memudahkan

peserta didik melihat objek yang harus diketahui dan akhirnya dipelajari, sebagai sebuah masalah.⁷ Bukan guru yang mengungkung kreativitas peserta didik dengan mempraktikkan model pendidikan “gaya bank”⁸ yang membatasi tugas peserta didik sekedar menerima, mencatat, dan menyimpan.⁹ Konsep pendidikan “gaya bank” menganggap peserta didik sebagai manusia bodoh yang tidak mengetahui apa-apa. Guru mengisi “tabungan” pengetahuan dan menuntut peserta didik untuk menerima begitu saja (*taken for granted*) tanpa celah sedikitpun memberikan ruang dialogis.

Guru sepantasnya meniadakan kesenjangan hierarkis antara dirinya dengan peserta didik dalam proses transfer pengetahuan di ruang kelas dengan sama-sama menempatkan diri pada posisi subjek kritis dari upaya “menjadi tahu”. Guru dan peserta didik tidak segan untuk saling belajar dari pengalaman masing-masing sehingga terbangun atmosfer pendidikan yang saling membebaskan.¹⁰

Sebelum melanjutkan penelaahan lebih jauh tentang pemikiran Paulo Freire, -anggap saja sebagai selingan- akan penulis paparkan pengalaman mengesankan yang pernah dialami

⁷ Paulo Freire, *Pendidikan sebagai Proses; Surat-menyurat Pedagogis dengan Para Pendidik Guinea-Bissau*, terj. Agung Prihantoro, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 11.

⁸ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, cet. ke-7, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2011), hlm. 52-53.

⁹ Siti Murtiningsih, *Pendidikan Alat Perlawanan; Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hlm. 74.

¹⁰ Ira Shor dan Paulo Freire, *Menjadi Guru Merdeka; Petikan Pengalaman*, terj. A. Nashir Budiman, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 50.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat (1).

seorang guru. Suatu saat, ketika malam beranjak larut, ponsel *jadul* seorang guru yang sudah sejak enam bulan terakhir tidak lagi mengajar, berdering tanda pesan singkat masuk. Setelah dibuka, ternyata pesan itu dikirim oleh peserta didiknya dengan bunyi, “Pak! Terima kasih ya, Pak!” Kemudian Sang Guru membalas dengan ekspresi agak terkejut, “Terima kasih untuk apa?” Tidak lama ponsel pun berdering lagi. “Buat semuanya. Dari pertama Bapak menanamkan berbagai ilmu di otakku. Dan itu tidak akan ada akhirnya. Terima kasih sekali lagi, Pak!” jawab peserta didik. Sang Guru pun terharu atas sikap anak didiknya. Meskipun sudah tidak lagi aktif mengajar dan secara fisik guru tersebut berada di batas geografi yang jauh, ternyata nilai-nilai edukatif yang pernah diajarkan dalam ruang kelas tidak pernah sedikitpun dilupakan.

Dari pengalaman tersebut, tidak ada salahnya guru memperhatikan nasehat Paulo Freire bahwa pendidikan merupakan praktik kebebasan, berlawanan dengan pendidikan sebagai praktik dominasi, yaitu pendidikan yang menolak anggapan bahwa manusia adalah sesuatu yang abstrak, berdiri sendiri, dan tidak terikat pada dunia.¹¹ Dialog merupakan metode yang paling tepat dalam mengentaskan peserta didik dari “budaya bisu”. Menurut Paulo Freire, kebisuan peserta didik diakibatkan oleh faktor dominasi guru di dalam proses pembelajaran. Sebenarnya, setiap peserta didik mempunyai gagasan yang ingin disampaikan di ruang kelas, namun tidak kuasa diverbalkan karena (di) terhalang(i) oleh gaya agresif guru

dalam mengajar.¹² Guru merangsang daya kritis peserta didik dengan memaparkan permasalahan tentang kondisi keterbaruan kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk memecahkannya melalui dialog multiarah (antar peserta didik dan dengan guru). Pendekatan yang digunakan oleh guru bukanlah *memorization* (sekedar mengingat-ingat apa yang dibacanya), tetapi *pedagogy of knowing* atau pendidikan sebagai usaha mendapatkan pengetahuan.¹³

Dalam karyanya yang lain, Paulo Freire menyematkan sebutan bagi guru yang tidak serius dalam penyampaian materi pembelajaran dengan terminologi pendidik konservatif. Lawannya ialah pendidik progresif yang senantiasa mengajarkan kepada peserta didik bagaimana “cara berpikir”. Lebih dari itu, pendidik progresif tidak mungkin membuang “pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman hidup” yang dibawa peserta didik ke sekolah.¹⁴ Selanjutnya Freire menyatakan:

“...sementara dalam praktik pendidikan konservatif yang mengajarkan isi (pelajaran) seorang guru berusaha menyembunyikan *raison d’etre* dari berbagai persoalan sosial, dalam praktik pengajaran yang progresif seorang guru (justru) berusaha menyingkap

¹² Ira Shor dan Paulo Freire, *Menjadi Guru Merdeka...*, hlm. 180.

¹³ Paulo Freire, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto, cet. ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 104.

¹⁴ Paulo Freire, *Pendidikan Masyarakat Kota*, terj. Agung Prihantoro, cet. ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 13-14.

¹¹ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum...*, hlm. 66.

berbagai penyebab persoalan sosial tersebut. Seorang guru konservatif berusaha mengakomodasikan dan mengadaptasikan siswa dengan dunia yang dihadapkannya. Sedangkan guru progresif berusaha membuat siswa bersikap kritis, yang berarti menantang siswa untuk memahami bahwa dunia yang dihadirkan sebagaimana adanya adalah sebuah dunia yang diciptakan, sehingga ia dapat diubah, ditransformasikan, dan direka ulang.¹⁵

Dalam catatan Ira Shor, sekurang-kurangnya ada beberapa agenda penting dalam ilmu pengajaran yang harus dicapai (guru) yaitu pembelajaran partisipatif,¹⁶ kritis,¹⁷ demokratis,¹⁸ dialogis,¹⁹ multikultural,²⁰ berorientasi riset,²¹ aktif,²² dan mengandung nilai-nilai afektif.²³

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Peserta didik banyak dilibatkan dalam pembelajaran dengan pendekatan interaktif-kooperatif sehingga tidak hanya mendengarkan ceramah guru. Peter McLaren dan Peter Leonard, *Paulo Freire; A Critical Encounter*, (London: Routledge, 1993), hlm. 33.

¹⁷ Peserta didik merefleksikan secara kritis pengetahuan mereka tentang materi pembelajaran dengan bahasa mereka sendiri dan menghubungkan dengan realitas sosial. *Ibid.*

¹⁸ Interaksi edukatif dibangun atas prinsip kesetaraan. *Ibid.*

¹⁹ Kondisi kelas diformat sedemikian rupa untuk mendialogkan berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh guru dan peserta didik. Guru memulai proses dialog dan mengarahkan peserta didik untuk berpikir mendalam atas materi pembelajaran. *Ibid.*

²⁰ Guru mengajak peserta didik untuk menghargai keanekaragaman ras, etnis, agama, usia, jenis kelamin, dan budaya. *Ibid.*, hlm. 34.

²¹ Guru secara aktif mendeteksi permasalahan yang mengganggu proses pembelajaran dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). *Ibid.*

Progresivisme menjadi basis epistemologis bagi guru dalam menerapkan pendidikan partisipatif. Pada konteks ini, Muis Sad Iman mengajukan beberapa argumentasi. *Pertama*, progresivisme kurang sepakat dengan pendidikan yang bercorak otoriter. *Kedua*, konsentrasi perhatian progresivisme selalu bergerak maju (progres). *Ketiga*, progresivisme menjunjung tinggi pengalaman sebagai ciri dinamika hidup. *Keempat*, progresivisme tidak saja mengakui ide-ide, teori-teori, atau cita-cita sebagai hal yang ada, tetapi yang ada itu harus dicari artinya bagi suatu kemajuan atau maksud-maksud baik lain. *Kelima*, progresivisme mengharuskan manusia dapat memfungsikan jiwanya untuk membina hidup di tengah persoalan yang menghimpit.²⁴ Dari kacamata filsafat, progresivisme terlacak mulai dari pemikiran filosof Yunani seperti Heraklitus²⁵ (544-484 SM), Protagoras²⁶ (480-410 SM), Socrates²⁷ (469-399 SM),

²² Dialog kritis di ruang kelas dengan sendirinya menuntut peserta didik untuk aktif. *Ibid.*

²³ Guru dalam kelas yang demokratis selalu berminat untuk mengamati perkembangan sikap peserta didik. *Ibid.*

²⁴ Muid Sad Iman, *Pendidikan Partisipatif; Menimbang Konsep Fitrah dan Progresivisme John Dewey*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 7-8.

²⁵ Menurut Heraklitus sifat yang terutama dari realita adalah perubahan. Tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini; semuanya berubah, kecuali asas perubahan itu sendiri. *Ibid.*, hlm. 40.

²⁶ Protagoras berpendapat bahwa kebenaran dan norma atau nilai (*value*) tidak bersifat mutlak melainkan relatif (bergantung pada waktu dan tempat). *Ibid.*

²⁷ Socrates mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk kebajikan. Kekuatan intelektual dan pengetahuan yang baik menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan kebajikan. *Ibid.*, hlm. 41.

Aristoteles²⁸ (383-322 SM), filosof abad XVI misalnya Francis Bacon²⁹ (1561-1626 M), John Locke³⁰ (1632-1704 M), Jean Jaques Rousseau³¹ (1721-1778 M), Immanuel Kant³² (1724-1804 M), Hegel³³ hingga filosof abad XIX seperti John Dewey (1896 M).³⁴

Guru progresif mengetahui kondisi psikologis peserta didik sehingga memahami momentum-momentum yang tepat ketika ia harus bertanya, menjelaskan materi, mengarahkan diskusi, mengelola kelas, menggunakan alat bantu (media belajar), memilih metode pembelajaran dalam rangka interaksi edukatif, dan mengevaluasi pengalaman belajar.

Jika boleh menyebutkan sosok, guru progresif terpancar dalam diri "Ibu Muslimah" dalam Novel *Best Seller* "Laskar Pelangi" karya Andrea Hirata yang akan selalu dikenang - meskipun sudah tidak lagi hadir secara fisik- di hadapan peserta didiknya. Guru progresif tidak dibatasi oleh ruang dan

waktu. Ia selalu menginspirasi setiap langkah peserta didik dalam mengarungi terjalnya samudera kehidupan. Semoga tulisan singkat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembentukan nalar guru progresif di percaturan dunia pendidikan Indonesia. Amin. *Wallahu a'lamu bi al-shawab.*

C. Penutup

Guru progresif adalah orang yang senantiasa mengajarkan kepada peserta didik bagaimana "cara berpikir". Lebih dari itu, pendidik progresif tidak mungkin membuang "pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman hidup" yang dibawa peserta didik ke sekolah. Sebagaimana pendapat Muis Sad Iman memberikan beberapa argumentasi terkait dengan istilah progresif. *Pertama*, progresivisme kurang sepakat dengan pendidikan yang bercorak otoriter. *Kedua*, konsentrasi perhatian progresivisme selalu bergerak maju (progres). *Ketiga*, progresivisme menjunjung tinggi pengalaman sebagai ciri dinamika hidup. *Keempat*, progresivisme tidak saja mengakui ide-ide, teori-teori, atau cita-cita sebagai hal yang ada, tetapi yang ada itu harus dicari artinya bagi suatu kemajuan atau maksud-maksud baik lain. *Kelima*, progresivisme mengharuskan manusia dapat memfungsikan jiwanya untuk membina hidup di tengah persoalan yang menghimpit.

DAFTAR PUSTAKA

Escobar, Miguel, dkk. (eds.), *Dialog Bareng Paulo Freire; Sekolah Kapitalisme yang Licik*, terj. Mundi Rahayu, cet. ke-1, Yogyakarta: LkiS, 1998.

²⁸ Aristoteles menyarankan moderasi dan kompromi (jalan tengah, bukan jalan ekstrim) dalam kehidupan. Dengan menghindari ekstrimitas, manusia dapat menggagas perubahan dan kemajuan (progress) secara lebih jernih, sehingga sikap moderasi merupakan salah satu langkah menuju kemajuan. *Ibid.*

²⁹ Francis Bacon mengusahakan perkembangan filsafat progresivisme dengan metode eksperimental (metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan kealaman). *Ibid.*

³⁰ Progresivisme John Locke bisa dilacak dari ajaran kebebasan politik. *Ibid.*

³¹ JJ. Rousseau meyakini bahwa manusia lahir sebagai mahluk yang baik dan menghendaki kemajuan. *Ibid.*

³² Gagasannya ialah memanusiakan manusia, menjunjung tinggi kepribadian manusia, dan menempatkan manusia pada martabat yang tinggi. *Ibid.*, hlm. 41-42.

³³ Hegel mempercayai bahwa alam dan masyarakat bersifat dinamis, selamanya berada dalam keadaan gerak, dalam proses perubahan dan penyesuaian tiada henti. *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 40-43.

- Freire, Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas*, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2011.
- _____, *Pendidikan sebagai Proses; Surat-menyurat Pedagogis dengan Para Pendidik Guinea-Bissau*, terj. Agung Prihantoro, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- _____, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Illich, Ivan, *Deschooling Society*, London: Marion Boyars Publishers, 1974.
- Iman, Muid Sad, *Pendidikan Partisipatif; Menimbang Konsep Fitrah dan Progresivisme John Dewey*, cet. ke-1, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Langeveld, M. J., *Padagogik Teoritis-Sistematis*, tt.p: t.p.,t.t.
- McLaren, Peter dan Peter Leonard, *Paulo Freire; A Critical Encounter*, London: Routledge, 1993.
- O'neil, William F., *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, terj. Omi Intan Naomi, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Shor, Ira dan Paulo Freire, *Menjadi Guru Merdeka; Petikan Pengalaman*, terj. A. Nashir Budiman, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 1